

**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Barito Selatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa agar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, perlu ditunjang dengan sistem penyelenggaraan kesehatan dan pembiayaan yang memadai dengan melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
5. Kesehatan adalah keadaan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau, modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosila politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.
8. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

9. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang/pasien yang meliputi jasa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penunjang, penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Daerah.
10. Tarif adalah nilai nominal dalam Rupiah yang ditetapkan pada setiap Pelayanan Kesehatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja 1-2 desa.
13. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
14. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien yang dilakukan di Puskesmas untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien yang dirawat tinggal di pelayanan kesehatan dalam jangka waktu tertentu untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Barito Selatan.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan untuk pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### NAMA OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 2

Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas.

### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, dan Puskesmas Keliling).
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, jenis dan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif retribusi sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

## BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

### Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau kuitansi.
- (3) Hasil retribusi pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Tata cara penerbitan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penagihan

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga  
Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB IX

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

## Pasal 16

Kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diterima oleh orang atau badan.

#### Bagian Kedua Tempat Pembayaran

## Pasal 17

Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan diberikan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran

## Pasal 18

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, mekanisme pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.



- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dengan cara mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, sosial, penyakit, korban kekerasan dalam rumah tangga dan atau kerusakan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk mendanai sebagian dari kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Semua hasil pungutan retribusi pada Pusat Kesehatan Masyarakat disetorkan 100% ke Kas Daerah/Bendahara penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dikembalikan sebesar 50% ke Puskesmas untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan Jasa Pelayanan di Puskesmas.
- (4) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke Puskesmas melalui mekanisme penganggaran pada SKPD Dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun Anggaran berikutnya.

## BAB XV PEMERIKSAAN

### Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

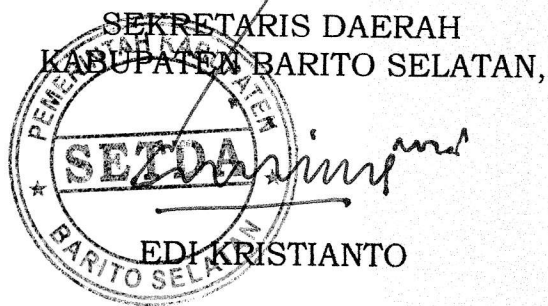
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok,  
pada tanggal 15 Desember 2018

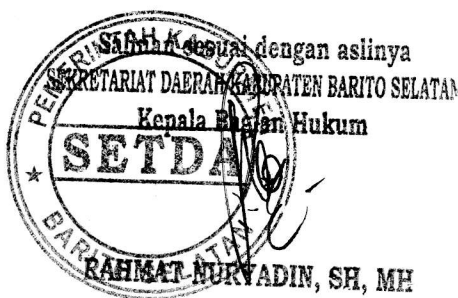


Diundangkan di Buntok,  
pada tanggal 15 Desember 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11,110/2018





**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya secara mandiri. Kesehatan adalah hak dasar penduduk yang telah diakui oleh Undang-Undang. Kesehatan juga merupakan investasi bangsa karena mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, pembangunan kesehatan masyarakat harus tetap terselenggara dalam situasi-kondisi apapun dan dimanapun tempatnya berada. Pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terhenti karena adanya batas-batas : kesukuan, ras dan agama serta ekonomi, sosial, politik dan keamanan.

Pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu dan tetap dapat dijangkau dan dinikmati masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya keterbatasan/sekat-sekat antar masyarakat. Pembangunan kesehatan tidak hanya ditujukan pada upaya penyembuhan karena sakit tetapi secara menyeluruh lebih berorientasi pada upaya perlindungan terhadap masyarakat yang masih sehat.

Puskesmas (termasuk pustu dan poskesdes) merupakan unit pelayanan kesehatan terdepan dan paling dekat dengan masyarakat. Keberadaan puskesmas di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menangkap permasalahan kesehatan masyarakat secara dini dan mendorong masyarakatnya secara mandiri merumuskan dan mencari upaya penuntasan permasalahan kesehatan yang telah dan akan dihadapi. Pelayanan laboratorium kesehatan sebagai bagian dari sub system kesehatan mendukung upaya-upaya : penyuluhan (promotion), pencegahan (prevention), pengobatan (therapy), penetapan penyakit (diagnosis) dan pengamatan penyakit (surveillans). Oleh karena itu, pelayanan laboratorium kesehatan memiliki dampak positif terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan. Hasil pengujian laboratorium kesehatan yang tepat dan handal menjadi unsur penentu keputusan /kebijakan hampir pada seluruh aspek pelayanan kesehatan (surveilans, diagnosis, prevention, promotion dan treatment).

Sejalan dengan kemajuan masyarakat, permasalahan kesehatan masyarakat semakin kompleks. Tuntutan penyediaan sarana kesehatan bermutu semakin tinggi. Sementara itu ketersediaan sumber daya terutama pembiayaan semakin terbatas. Oleh karena itu peran masyarakat, dunia usaha dan swasta terus didorong ikut berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat termasuk pembiayaannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Tarif retribusi ini merupakan sebagian biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Perhitungan tarif retribusi tidak memperhitungkan biaya/gaji pegawai, listrik, telekomunikasi dan biaya investasi gedung.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud alasan-alasan yang jelas antara lain karena kelebihan perhitungan pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR <sup>11</sup>

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA  
 TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

| NO. | JENIS PELAYANAN   | SATUAN    | TARIF (RP) |
|-----|---|-----------|------------|
| I   | <b>PEMERIKSAAN KESEHATAN</b>  |           |            |
|     | 1 Pemeriksaan Kesehatan Umum  | Kasus     | 10,000     |
|     | 2 Pemeriksaan Kesehatan Pelajar Rujukan dari UKS                      | Kasus     | 5,000      |
|     | 3 Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin (CATIN)                       | Kasus     | 10,000     |
|     | 4 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji<br>(Fisik & Lab. Sederhana) | Kasus     | 250,000    |
|     | 5 Pemeriksaan Kesehatan dengan tes Narkoba bahan Urine                | Kasus     | 200,000    |
|     | 6 Pemeriksaan Tes Butawarna   | Kasus     | 25,000     |
|     | 7 Surat Ket. Kes. untuk Pendidikan/Penataran bagi PNS                 | Kasus     | 25,000     |
|     | 8 Surat Ket. Kes. KIR Sehat   | Kasus     | 25,000     |
|     | 9 Surat Keterangan Sakit  | Kasus     | 5,000      |
|     | 10 Surat Keterangan Kehamilan   | Kasus     | 20,000     |
|     | 11 Surat Keterangan Kelahiran   | Kasus     | 20,000     |
|     | 13 Surat Keterangan untuk Menikah                                     | Kasus     | 20,000     |
|     | 14 Surat Keterangan Penghapusan Capeg                                 | Kasus     | 20,000     |
|     | 15 Surat Keterangan Jenazah   | Kasus     | 20,000     |
|     | 16 Surat Keterangan Lainnya   | Kasus     | 20,000     |
| II  | <b>PELAYANAN KESEHATAN GIGI</b>                                       |           |            |
|     | 1 Incisi Abses Intra Oral   | Gigi      | 15,000     |
|     | 2 Koreksi Oklusi Per Regio Kiri / Kanan                               | per regio | 20,000     |
|     | 3 Operculectomy   | Gigi      | 30,000     |
|     | 4 Operasi Gigi Molar 3 Miring   | Gigi      | 100,000    |
|     | 5 Pencabutan Gigi Anak (susu)   | Gigi      | 12,750     |
|     | 6 Pencabutan Gigi Susu dengan penyulit                                | Gigi      | 25,000     |
|     | 7 Pencabutan Gigi Tetap Ringan  | Gigi      | 12,750     |
|     | 8 Pencabutan Gigi Tetap Sedang  | Gigi      | 18,750     |
|     | 9 Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi                             | Gigi      | 45,000     |
|     | 10 Pembersihan Karang Gigi tiap Rahang Ringan                         | Rahang    | 25,000     |
|     | 11 Pembersihan Karang Gigi tiap Rahang Sedang                         | Rahang    | 35,000     |
|     | 12 Pembersihan Karang Gigi tiap Rahang Berat                          | Rahang    | 50,000     |
|     | 13 Skaling dan Kuretase Per gigi                                      | Gigi      | 10,000     |
|     | 14 Perawatan Syaraf Gigi Kunjungan Pertama                            | Gigi      | 30,000     |
|     | 15 Perawatan Syaraf Gigi Kunjungan Ke II dst                          | Gigi      | 15,000     |
|     | 16 Perawatan Pulp Capping   | Gigi      | 25,000     |
|     | 17 Skaling dan Kuretase Per gigi                                      | Gigi      | 10,000     |
|     | 18 Tumpatan Gigi Sementara  | Gigi      | 5,000      |
|     | 19 Tumpatan Gigi Komposite Kecil                                      | Gigi      | 15,000     |
|     | 20 Tumpatan Gigi Komposite Sedang                                     | Gigi      | 20,000     |
|     | 21 Tumpatan Gigi Komposite Besar                                      | Gigi      | 25,000     |
|     | 22 Tumpatan Glass Ionomer Kecil                                       | Gigi      | 10,000     |
|     | 23 Tumpatan Glass Ionomer Sedang                                      | Gigi      | 15,000     |
|     | 24 Tumpatan Glass Ionomer Berat                                       | Gigi      | 20,000     |





| NO.                                       | JENIS PELAYANAN   | SATUAN      | TARIF (RP) |
|---|---|-------------|------------|
| <b>III PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK</b> |   |             |            |
| 1   | Pemeriksaan Laboratorium Sederhana Darah (Hb, LED, Lekosit,dan Trombosit) | Pemeriksaan | 25,000     |
| 2   | Pemeriksaan Hb  | Pemeriksaan | 10,000     |
| 3   | Pemeriksaan Hitung Jumlah Lekosit   | Pemeriksaan | 5,000      |
| 4   | Pemeriksaan Hitung Jumlah Trombosit                                       | Pemeriksaan | 5,000      |
| 5   | Pemeriksaan LED   | Pemeriksaan | 5,000      |
| 6   | Pemeriksaan Golongan Darah (Anti A, Anti B, Anti D)                       | Pemeriksaan | 10,000     |
| 7   | Pemeriksaan Laboratorium Urin Lengkap (10 Parameter)                      | Pemeriksaan | 50,000     |
| 8   | Pemeriksaan Laboratorium Sederhana Urin                                   | Pemeriksaan | 15,000     |
| 9   | Pemeriksaan Laboratorium Sederhana Faeces                                 | Pemeriksaan | 15,000     |
| 10  | Pemeriksaan Widal ( S. Typhi O, S.Typhi H, P,A-O, P.B-O)                  | Pemeriksaan | 20,000     |
| 11  | Pemeriksaan Kolesterol  | Pemeriksaan | 25,000     |
| 12  | Pemeriksaan Asam Urat   | Pemeriksaan | 25,000     |
| 13  | Pemeriksaan Trigliserida  | Pemeriksaan | 30,000     |
| 14  | Pemeriksaan Gula Darah (Sewaktu,Puasa)                                    | Pemeriksaan | 25,000     |
| 15  | Pemeriksaan Darah Malaria   | Pemeriksaan | 10,000     |
| 16  | Pemeriksaan Filariasis ( Diluar Jam Kerja Pengambilan darah malam)        | Pemeriksaan | 30,000     |
| 17  | Pemeriksaan BTA seputum 3 waktu (SPS)                                     | Pemeriksaan | 15,000     |
| 18  | Pemeriksaan kuman Gonorrhoe (Sifilis Test Strip)                          | Pemeriksaan | 50,000     |
| 19  | Pemeriksaan Tes Kehamilan   | Pemeriksaan | 20,000     |
| 20  | Pemeriksaan EKG   | Pemeriksaan | 40,000     |
| <b>IV TINDAKAN MEDIK</b>                  |   |             |            |
| 1   | Bilas Lambung   | Tindakan    | 54,000     |
| 2   | Cerumen Prop.   | Tindakan    | 13,500     |
| 3   | Circumsisi / Sunat / Khitan   | Tindakan    | 125,000    |
| 4   | Debridemen Luka   | Tindakan    | 10,000     |
| 5   | Eksterpasi Lipom / Ganglion / Nevus                                       | Tindakan    | 25,000     |
| 6   | Eksterpasi Hordeolum  | Tindakan    | 20,000     |
| 7   | Eksisi Clavus / Kista Ateroma   | Tindakan    | 11,250     |
| 8   | Ekstraksi Corpus Alienum Hidung   | Tindakan    | 11,250     |
| 9   | Ekstraksi Corpus Alienum Telinga  | Tindakan    | 13,500     |
| 10  | Ekstrasi / Eksterpasi Nail  | Tindakan    | 15,000     |
| 11  | Evakuasi Digital Pada Aborsi  | Tindakan    | 87,500     |
| 12  | Ganti Verban  | Tindakan    | 10,000     |
| 14  | Insisi Sederhana  | Tindakan    | 13,500     |
| 15  | Insisi ( lipom,dll)   | Tindakan    | 18,750     |
| 16  | Infus Pump per Jam  | Tindakan    | 11,250     |
| 17  | Injeksi Intramuskuler   | Tindakan    | 12,750     |
| 18  | Injeksi intralesi   | Tindakan    | 18,750     |
| 19  | Irigasi Hidung  | Tindakan    | 7,500      |
| 20  | Irigasi Mata  | Tindakan    | 11,250     |
| 21  | Irigasi Telinga   | Tindakan    | 13,125     |
| 22  | Irigasi Mulut   | Tindakan    | 7,000      |
| 23  | Jahitan Luka (1-5 jahitan)  | Tindakan    | 18,750     |
| 24  | Jahitan Luka (6-10 jahitan)   | Tindakan    | 11,250     |
| 25  | Jahitan Luka $\geq$ 10 jahitan ( Perjahitan Rp. 2500 )                    | Tindakan    | 2,500      |
| 26  | Lepas Jahitan   | Tindakan    | 6,000      |
| 27  | Lepas Tampon  | Tindakan    | 22,500     |
| 28  | Lepas Gips  | Tindakan    | 50,000     |
| 29  | Memandikan dan Perawatan Tali Pusat                                       | Tindakan    | 13,500     |
| 30  | Monitoring UGD dibawah 6 jam  | Kasus       | 10,000     |
| 31  | Manual Placenta Oleh Dokter   | Tindakan    | 315,000    |
| 32  | Manual Placenta Oleh Bidan  | Tindakan    | 263,000    |
| 33  | Perawatan Luka Ringan   | Tindakan    | 10,000     |
| 34  | Perawatan Luka Sedang   | Tindakan    | 15,000     |
| 35  | Perawatan Luka Berat  | Tindakan    | 30,000     |

| NO. | JENIS PELAYANAN   | SATUAN          | TARIF (RP) |
|-----|---|-----------------|------------|
| 36  | Perawatan Luka Gangren Stadium 0 - 2                                | Tindakan        | 5,500      |
| 37  | Perawatan Luka Gangren Stadium 3 - 4                                | Tindakan        | 11,000     |
| 38  | Reposisi Fraktur Sederhana + Spalk                                  | Tindakan        | 60,000     |
| 39  | Perawatan Luka Decubitus  | Tindakan        | 11,250     |
| 40  | Pemasangan Kateter /uretra  | Tindakan        | 11,250     |
| 41  | Pelepasan Kateter   | Tindakan        | 11,250     |
| 42  | Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)                                  | Tindakan        | 15,000     |
| 43  | Pemberian Makanan Per Sonde   | Tindakan        | 15,000     |
| 44  | Pemasangan Infus Dewasa   | Tindakan        | 9,000      |
| 45  | Pemasangan Infus Anak   | Tindakan        | 11,250     |
| 46  | Pemasangan Infus Bayi   | Tindakan        | 11,250     |
| 47  | Pelepasan Infus   | Tindakan        | 10,000     |
| 48  | Pemasangan Spalk  | Tindakan        | 5,000      |
| 49  | Pelepasan Spalk   | Tindakan        | 5,000      |
| 50  | Pelepasan Gips  | Tindakan        | 10,000     |
| 51  | Pemakaian Nebulizer ( sekali Pakai )                                | Tindakan        | 37,500     |
| 52  | Pemakaian Oksigen   | Liter per menit | 500        |
| 53  | Pemasangan Perban Elastis   | Tindakan        | 11,250     |
| 54  | Pasang Tampon   | Tindakan        | 22,500     |
| 55  | Pasang Tampon Hidung Anterior                                       | Tindakan        | 14,000     |
| 56  | Pasang Tampon Telinga   | Tindakan        | 11,250     |
| 57  | Pasang Tampon Uterovaginal  | Tindakan        | 67,500     |
| 58  | Pemberian obat Intra Muskuler                                       | Tindakan        | 7,500      |
| 59  | Pemberian obat Intra Vaginal  | Tindakan        | 3,750      |
| 60  | Pemberian obat Intra Vena   | Tindakan        | 5,625      |
| 61  | Pemberian obat Rectal   | Tindakan        | 11,250     |
| 62  | Pemberian obat Sub Cutan  | Tindakan        | 9,000      |
| 63  | Pengambilan sediaan Laboratorium                                    | Tindakan        | 11,250     |
| 64  | Perawatan Luka Bakar < 10 %   | Tindakan        | 12,500     |
| 65  | Perawatan Luka Bakar 10 % - 20 % Tanpa Komplikasi                   | Tindakan        | 15,000     |
| 66  | Perawatan Gigitan Binatang  | Tindakan        | 5,000      |
| 67  | Pelepasan IUD   | Tindakan        | 50,000     |
| 68  | Pemasangan IUD  | Tindakan        | 50,000     |
| 69  | Pemasangan Implant  | Tindakan        | 75,000     |
| 70  | Pelepasan Implant   | Tindakan        | 75,000     |
| 71  | Perawatan Abortus   | Tindakan        | 100,000    |
| 72  | Pemeriksaan IVA   | Tindakan        | 25,000     |
| 73  | Pengambilan sediaan paps smear                                      | Tindakan        | 38,000     |
| 74  | Pertolongan Persalinan Normal di Puskesmas PONED<br>( oleh Bidan )  | Tindakan        | 200,000    |
| 75  | Pertolongan Persalinan Normal di Puskesmas PONED<br>( oleh Dokter ) | Tindakan        | 256,000    |
| 76  | Pertolongan Persalinan dengan tindakan Pervaginan<br>(penyulit)     | Tindakan        | 570,000    |
| 77  | Perawatan Bayi Baru Lahir Normal                                    | Tindakan        | 25,000     |
| 78  | Perawatan Tali Pusat  | Tindakan        | 11,250     |
| 79  | Perawatan Neonatal dengan Inkubator                                 | Tindakan        | 12,500     |
| 80  | Reposisi Sederhana / Tertutup                                       | Tindakan        | 60,000     |
| 81  | Roser Plasty / Cabut kuku   | Tindakan        | 15,000     |
| 82  | Repair Jalan Lahir Grade I  | Tindakan        | 150,000    |
| 83  | Repair Jalan Lahir Grade II   | Tindakan        | 225,000    |
| 84  | Repair Jalan Lahir Grade III  | Tindakan        | 300,000    |
| 85  | Reparasi Luka Robek Sederhana                                       | Tindakan        | 30,000     |
| 86  | Reposisi Fiksasi  | Tindakan        | 100,000    |
| 87  | Resusitasi  | Tindakan        | 150,000    |
| 88  | Resusitasi Bayi Apnoe   | Tindakan        | 225,000    |
| 89  | Resusitasi Bayi Baru Lahir Fisiologis                               | Tindakan        | 120,000    |
| 90  | Resusitasi Bayi Baru Lahir Patologis                                | Tindakan        | 63,000     |
| 91  | Suntik KB DEPO 3 Bulan  | Tindakan        | 20,000     |
| 92  | Suntik KB DEPO 1 Bulan  | Tindakan        | 25,000     |
| 93  | Suction   | Tindakan        | 15,000     |
| 94  | Suppositoria  | Tindakan        | 15,000     |
| 95  | Tindik daun telinga   | Tindakan        | 7,500      |
| 96  | Test Alergi ( Ekstrak Makanan )                                     | Tindakan        | 12,000     |
| 97  | Test Alergi Antibiotik  | Tindakan        | 4,000      |
| 98  | Test Alergi ( Test Tempel )   | Tindakan        | 10,000     |
| 99  | Vagina Swap   | Tindakan        | 12,000     |

| NO. | JENIS PELAYANAN   | SATUAN     | TARIF (RP) |
|-----|---|------------|------------|
| V   | <b>RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA</b>   |            |            |
|     | 1 a Rawat inap tanpa makan  | Hari Rawat | 50,000     |
|     | b Rawat inap dengan makan   | Hari Rawat | 75,000     |
|     | c Rawat inap ruang khusus tanpa makan   | Hari Rawat | 75,000     |
|     | d Rawat inap ruang khusus dengan makan  | Hari Rawat | 100,000    |
|     | 2 <b>Rawat Inap Anak / Dewasa</b>   |            |            |
|     | a Jasa Sarana   | Hari Rawat | 30,000     |
|     | b Jasa Perawatan  | Hari Rawat | 40,000     |
|     | c Jasa dokter visite  | Hari Rawat | 10,000     |
|     | 3 <b>Rawat Inap Bersalin</b>  |            |            |
|     | a Jasa Sarana   | Hari Rawat | 30,000     |
|     | b Jasa Perawatan  | Hari Rawat | 40,000     |
|     | c Jasa dokter visite  | Hari Rawat | 10,000     |
|     | d Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya                                 | Hari Rawat |            |
|     | e Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya dengan makan                    | Hari Rawat | 112,500    |
|     | f Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya ruang khusus dengan tanpa makan | Hari Rawat | 112,500    |
|     | g Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya ruang khusus dengan makan       | Hari Rawat | 150,000    |
|     | 4 <b>Biaya Konsul dokter</b>  | hari       | 10,000     |
|     | 5 <b>Ruang Isolasi</b>  | Hari       | 40,000     |
|     |   |            |            |
|     | <b>VI PELAYANAN LAINNYA</b>   |            |            |
|     | 1 Fisioterapi   | Kasus      | 25,000     |
|     | 2 Kesehatan tradisional   | Kasus      | 12,500     |
|     | 3 Otopsi Jenazah  | Kasus      | 500,000    |
|     | 4 Pengangkutan Pasien (per KM, minimal 5 KM)  | Km         | 5,000      |
|     | 5 Pemulasaran Formalin pada Jenazah ( sudah termasuk harga Formalin)                        | Kasus      | 1,200,000  |
|     | 6 Perawatan Jenazah/ Konservasi   |            |            |
|     | a Umum  | Kasus      | 100,000    |
|     | b Khusus  | Kasus      | 300,000    |
|     | 7 Transportasi Jenazah (per KM, minimal 5 KM)   | Km         | 10,000     |
|     | 8 Visum et repertum Pasien Hidup  | Kasus      | 150,000    |
|     | 9 Visum et repertum Mayat   | Kasus      | 250,000    |

# TARIF BIAYA RUJUKAN

| NO   | JENIS PELAYANAN  | BBM   | SOPIR/MOTORIS<br>/ORANG  | NAKES<br>PENDAMPING<br>/ORANG                                      | JASA<br>SARANA   | TOTAL  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| I    | <b>PUSKESMAS BUNTOK</b><br>ANGKUTAN DARAT DALAM KOTA   | Rp 20,000   | Rp 20,000  | Rp 20,000  | Rp 10,000  | Rp 70,000  |
| II   | <b>PUSKESMAS BARU</b><br>ANGKUTAN DARAT<br>BARU - BUNTOK   | Rp 75,000   | Rp 50,000  | Rp 50,000  | Rp 50,000  | Rp 225,000   |
| III  | <b>PUSKESMAS SABABILAH</b><br>ANGKUTAN DARAT<br>SABABILAH - BUNTOK   | Rp 75,000   | Rp 50,000  | Rp 50,000  | Rp 50,000  | Rp 225,000   |
| IV   | <b>PUSKESMAS KALAHIEN</b><br>ANGKUTAN DARAT<br>KALAHIEN - BUNTOK   | Rp 100,000  | Rp 75,000  | Rp 75,000  | Rp 100,000   | Rp 350,000   |
| V    | <b>PUSKESMAS TABAK KANILAN</b><br>ANGKUTAN DARAT<br>TABAK KANILAN - BUNTOK   | Rp 130,000  | Rp 100,000   | Rp 100,000   | Rp 230,000   | Rp 560,000   |
| VI   | <b>PUSKESMAS PATAS I</b><br>A. ANGKUTAN DARAT<br>PATAS I - BUNTOK  | Rp 220,000  | Rp 100,000   | Rp 100,000   | Rp 230,000   | Rp 650,000   |
| VII  | <b>PUSKESMAS B. BAMBURE</b><br>A. ANGKUTAN DARAT<br>B. BAMBURE - BUNTOK  | Rp 270,000  | Rp 100,000   | Rp 100,000   | Rp 250,000   | Rp 720,000   |
| VIII | <b>PUSKESMAS PENDANG</b><br>A. ANGKUTAN DARAT<br>PENDANG - BUNTOK<br>B. ANGKUTAN AIR<br>PENDANG - BUNTOK   | Rp 220,000<br>Rp 835,000  | Rp 110,000<br>Rp 110,000   | Rp 110,000<br>Rp 110,000   | Rp 250,000<br>Rp 210,000   | Rp 690,000<br>Rp 1,265,000   |
| IX   | <b>PUSKESMAS BABAI</b><br>A. ANGKUTAN AIR<br>BABAI - BUNTOK  | Rp 820,000  | Rp 110,000   | Rp 110,000   | Rp 210,000   | Rp 1,250,000   |
| X    | <b>PUSKESMAS BANGKUANG</b><br>A. ANGKUTAN DARAT<br>BANGKUANG - BUNTOK<br>BANGKUANG - TAMIANG LAYANG<br>BANGKUANG - TANJUNG<br>BANGKUANG - AMUNTAI<br>B. ANGKUTAN AIR<br>BANGKUANG - BUNTOK | Rp 250,000<br>Rp 150,000<br>Rp 250,000<br>Rp 350,000<br>Rp 770,000  | Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 110,000 | Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 110,000 | Rp 200,000<br>Rp 150,000<br>Rp 200,000<br>Rp 200,000<br>Rp 310,000 | Rp 650,000<br>Rp 500,000<br>Rp 650,000<br>Rp 750,000<br>Rp 1,300,000   |
| XI   | <b>PUSKESMAS MANGKATIP</b><br>A. ANGKUTAN DARAT<br>MANGKATIP - BUNTOK<br>MANGKATIP - AMUNTAI<br>MANGKATIP - TAMIANG LAYANG<br>MANGKATIP - TANJUNG<br>B. ANGKUTAN AIR<br>MANGKATIP - BUNTOK | Rp 500,000<br>Rp 350,000<br>Rp 200,000<br>Rp 300,000<br>Rp1,120,000 | Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 120,000 | Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 120,000 | Rp 250,000<br>Rp 250,000<br>Rp 250,000<br>Rp 250,000<br>Rp 210,000 | Rp 950,000<br>Rp 800,000<br>Rp 650,000<br>Rp 750,000<br>Rp 1,570,000   |
| XII  | <b>PUSKESMAS JENAMAS</b><br>A. ANGKUTAN DARAT<br>JENAMAS - AMUNTAI<br>JENAMAS - TAMIANG LAYANG<br>JENAMAS - TANJUNG<br>JENAMAS - BUNTOK<br>B. ANGKUTAN AIR<br>JENAMAS - BUNTOK             | Rp 500,000<br>Rp 400,000<br>Rp 450,000<br>Rp 600,000<br>Rp1,520,000 | Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 145,000 | Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 100,000<br>Rp 145,000 | Rp 250,000<br>Rp 250,000<br>Rp 250,000<br>Rp 250,000<br>Rp 320,000 | Rp 950,000<br>Rp 850,000<br>Rp 900,000<br>Rp 1,050,000<br>Rp 2,130,000 |

  
 BUPATI BARITO SELATAN,  
  
 EDDY RAYA SAMSURI